

**PERAN AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH DAERAH,
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, BUDAYA ORGANISASI
TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN****Gusti Willies Aisyah¹, Januar Taufan²**Universitas Muhammadiyah Jakarta ^{1,2}¹ williesaisyah@gmail.com² januar.taufan@umj.ac.id**Informasi artikel**

Diterima :

13 Februari 2025

Direvisi :

14 Februari 2025

Disetujui :

14 Februari 2025

ABSTRACT

This study aims to empirically prove the effect of the role of local government internal auditors, the effectiveness of internal control, and organizational culture on fraud prevention. This research uses a quantitative approach. The data collection method used is primary data with the field survey method. The population in this study were employees who worked at Inspektorat Kotabaru District. The sampling technique used nonprobability sampling with saturated sampling technique. Data collection was carried out by sending google forms to respondents as many as 36 respondents. The data was processed using SPSS version 25. The results of this study partially show that the role of local government internal auditors has a positive and not significant effect on fraud prevention, the effectiveness of internal control has a positive and significant effect on fraud prevention, and organizational culture has a positive and significant effect on fraud prevention..

Keywords : *The Role of Local Government, The Effectiveness of Internal Control, Organizational Culture, Fraud Prevention*

PENDAHULUAN

Kecurangan selalu menjadi isu hangat di negara ini. Hingga saat ini, pemerintah belum bisa menuntaskan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kecurangan telah merambat ke semua sektor. Tidak hanya sektor swasta dan BUMN tetapi telah merambat ke sektor publik. Kecurangan ini terjadi akibat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan tinggi serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait.

Setiap tahun pemerintah kabupaten/kota mendapatkan pendapatan daerah yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah tiap Kabupaten/Kota

No.	Tahun	Pendapatan Daerah
1.	2018	Rp1,5 triliun
2.	2019	Rp1,6 triliun
3.	2020	Rp1,5 triliun
4.	2021	Rp1,5 triliun
5.	2022	Rp1,4 triliun

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan data statistik lima tahun terakhir, pemerintah kabupaten/kota mengelola pendapatan daerah yang cukup besar setiap tahunnya dengan rata-rata 1 triliun tiap kabupaten/kota. Dana yang cukup besar ini memberikan dampak positif untuk kemajuan setiap kabupaten/kota di Indonesia. Namun, hal ini dapat menjadi dampak negatif seperti terjadi penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang memiliki jabatan tinggi di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah merupakan sektor publik yang paling rentan terjadinya kecurangan.

Kecurangan merupakan representasi palsu dengan segala cara yang unik yang dilakukan oleh akal pikir manusia guna mendapatkan keuntungan. Tidak ada aturan pasti dalam mendefinisikan kecurangan, karena tindakan yang dilakukan dapat mencakup kecurangan, penipuan, serta semua tindakan yang tidak jujur yang digunakan untuk melakukan kecurangan. (Albrecht & Zimmerman, 2012)

Menurut Cressey (1953) kecurangan dapat disebabkan karena adanya kesempatan (*opportunity*) bagi karyawan untuk melakukan kecurangan di mana karyawan tersebut memiliki wewenang di instansi tersebut, timbulnya rasionalisasi (*rationalization*) terhadap perilaku kecurangan yang membenarkan kecurangan tersebut dikarenakan kurangnya motivasi yang diberikan oleh instansi, serta tekanan (*pressure*) dari pejabat yang memiliki wewenang lebih tinggi (Barus dkk., 2021). Faktor-faktor kecurangan tersebut harus ditindaklanjuti dengan melakukan pencegahan (*preventif*) untuk keberhasilan pencegahan kecurangan yang terjadi di sektor publik.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners tahun 2019 menunjukkan bahwa kecurangan yang paling merugikan di Indonesia ialah 69,9% korupsi, 9,2% kecurangan pada laporan keuangan dan 20,9% penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan (ACFE, 2020). Korupsi menjadi bentuk fraud yang paling merugikan di negara ini. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan bahwa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK semakin meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Korupsi yang ditangani KPK

Instansi	2018	2019	2020	2021	2022
Pemerintah Daerah	143	77	61	80	81

Sumber: KPK (2023) diolah penulis

Selama lima tahun terakhir pemerintah daerah menjadi instansi pemerintah yang paling banyak tersangkut kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara urusan daerah diawasi langsung oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai auditor intern pemerintah daerah”. Namun,

pemerintah daerah masih menjadi sorotan publik sebagai pemerintahan yang memiliki tingkat kasus fraud yang tinggi.

KAJIAN LITERATUR

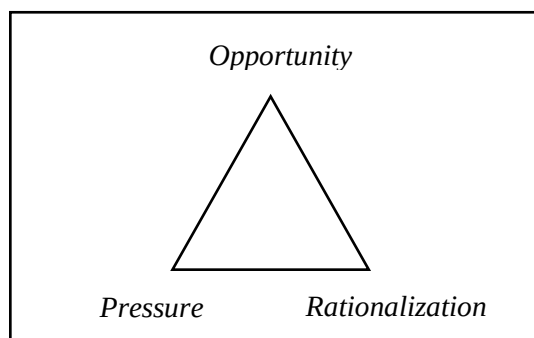
Role Theory

Teori peran (Role Theory) merupakan teori yang dikembangkan oleh Kahn, dkk (1964). Teori ini merupakan perpaduan antara teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam dunia teater, seorang aktor sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tertentu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Seperti halnya teater, aktor tidak dapat berdiri sendiri dalam memainkan perannya tetapi ada hal-hal lain yang berhubungan dengan aktor. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang diharapkan masyarakat yang mana tidak dapat berdiri sendiri melainkan ada orang-orang lain yang berhubungan dengan peran tersebut (Hutami & Chariri, 2011).

Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan (Rahman dkk., 2018).

Teori Fraud Triangle

Menurut Tuanakotta (2007) dalam Anugerah (2014), fraud triangle adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey yang didalamnya berisi tiga faktor penyebab seseorang melakukan kecurangan (fraud).



Gambar 1 *Fraud Triangle*

Unsur-unsur *fraud triangle* adalah : (1) *Pressure* (tekanan), merupakan keadaan emosional yang dapat mendorong untuk melakukan kecurangan. (2) *Opportunity* (peluang), kondisi dimana seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan. (3) *Rationalization* (rasionalisasi), kondisi dimana seseorang membenarkan tindak kecurangan yang dilakukan.

Kecurangan (Fraud)

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* merupakan suatu upaya atau perilaku seseorang yang menjadi masalah global yang melanggar ketentuan hukum serta melanggar kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dengan sengaja secara tersembunyi dengan berbagai tujuan tertentu, seperti melakukan manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008), *fraud* adalah suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak internal atau eksternal di organisasi yang bertujuan guna mendapatkan keuntungan sendiri atau kelompok yang akan merugikan pihak lain atau organisasi.

Auditor Internal Pemerintah

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan memeriksa dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan (Tugiman, 2000). Menurut Institute of Internal Audit (IIA) (1999, 2004) yang dikutip dalam Zunaedi dkk. (2022), internal audit adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Hal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan proses tata kelola.

Auditor internal pemerintah yang disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di setiap kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kotamadya.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan: KEP- 496/BL/2008 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, audit internal adalah kegiatan untuk memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan meningkatkan kualitas organisasi dan mengevaluasi operasi yang telah dijalankan oleh organisasi melalui pemeriksaan, evaluasi, serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern organisasi.

Pengendalian Internal

Menurut COSO (2012) pengendalian internal adalah proses yang dilakukan dewan direksi, manajemen, dan semua karyawan suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan untuk mencapai tujuan entitas yang berkaitan dengan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk menjamin pencapaian dari tujuan organisasi (Arens et. al., 2008)

Pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dirancang untuk melindungi kekayaan organisasi, pemeriksaan terhadap ketelitian dan keandalan data akuntansi yang diolah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan telah dipatuhi oleh setiap anggota organisasi (Mulyadi 2001)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, “sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi bersifat dinamis yang selalu secara terus menerus dilakukan dan diciptakan melalui interaksi setiap orang dan dibentuk oleh perilaku pemimpin dalam struktur organisasi, kebiasaan, kebijakan dan aturan-aturan, serta norma-norma yang berlaku yang mendorong dan membatasi perilaku. (Schein: 2004), (Mudasir: 2017), (Aprilia & Yuniarsih: 2021).

METODE PENELITIAN

Design penelitian ini merujuk pada pendekatan kualitatif metode asosiatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara variabel-variabel. Sumber data diambil dari auditor internal inspektorat Kabupaten Kotabaru dengan jumlah

populasi dan sampel yang digunakan sebanyak 36 responden dengan metode pengambilan sampel yaitu sampel jenuh. Metode pengumpulan dengan koisioner melalui penyebaran *google form*. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linier dengan alat analisis SPSS 25.0.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Untuk melakukan pengujian validitas setiap butir pernyataan. Hasil pengujian validitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan r_{hitung} (nilai *pearson correlation*) dengan r_{tabel} , dalam r_{tabel} terdapat *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini, n merupakan jumlah sampel sebanyak 36 sampel berarti $df = 36-2 = 34$. Untuk pengujian validitas menggunakan tingkat signifikan 0,10 dengan uji dua sisi. Dengan demikian, r_{tabel} sebesar 0,278. Jika $r_{hitung} > 0,278$ maka instrumen berkorelasi signifikan terhadap skor total. Hal ini berarti instrumen dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah melakukan perhitungan setiap item varian variabel dengan total varian variabel. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach*.

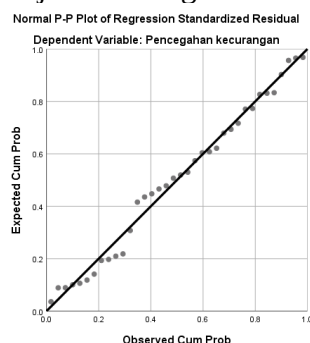
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of items	Keterangan
Peran Auditor Internal Pemerintah Daerah (X1)	0,862	15	RELIABEL
Efektivitas Pengendalian Internal (X2)	0,839	19	RELIABEL
Budaya Organisasi (X3)	0,504	14	RELIABEL
Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Y)	0,833	12	RELIABEL

Sumber: diolah penulis

Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan *Normal Probability Plot* (P-Plot) dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov, dikatakan normal jika membentuk suatu garis lurus diagonal. Data yang berdistribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonalnya. Selain itu, data berdistribusi normal jika nilai Kolmogorov-Smirnov dengan signifikansi $> 0,05$. Sebaliknya data tidak memiliki distribusi normal jika nilai signifikansi $< 0,05$.



Gambar 2. Hasil Uji Normal Probability Plot (P-Plot)

Sumber: diolah penulis

Dari gambar dapat dilihat setiap titik mendekati garis lurus diagonal serta mengikuti arah garis diagonalnya. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan setiap titik menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonalnya, sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.68719400
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.098
	Negative	-.078
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: diolah penulis

Dapat dilihat nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,098 dengan nilai Asymp.Sig sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa variabel berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal mempunyai nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga data sesuai dengan model yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Model Regresi

Penelitian ini telah memenuhi syarat dalam asumsi uji klasik, sehingga dapat melakukan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh peran auditor internal pemerintah daerah, efektivitas pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan (fraud).

Tabel 5. Model Regresi Linier

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.508	4.318		-.118	.907
	Peran Auditor Pemerintah Daerah	.017	.098	.023	.171	.865
	Efektivitas Pengendalian Internal	.334	.092	.504	3.639	.001
	Budaya organisasi	.405	.103	.444	3.925	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan kecurangan

Sumber: diolah penulis

Dari tabel diatas menunjukkan nilai-nilai output yang dimasukan pada persamaan regresi linear berganda, sebagai berikut:

$$Y = -0,508PK + 0,017PAIPD + 0,334EPI + 0,405BD + e$$

Angka-angka tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstan (α) sebesar diasumsikan nilai X adalah 0, maka nilai Y akan menunjukkan tingkat sebesar atau dapat dikatakan jika tidak ada variabel X maka variabel Y sebesar -0,508.
- Koefisien regresi pada variabel peran auditor internal pemerintah daerah (X_1) menunjukkan nilai positif sebesar 0,017, dengan demikian peran auditor internal pemerintah daerah (X_1) akan mencegah kecurangan (fraud) (Y) sebesar 0,017 dengan asumsi nilai variabel lain adalah tetap.
- Koefisien regresi pada variabel efektivitas pengendalian internal (X_2) menunjukkan nilai positif sebesar 0,334, dengan demikian peran efektivitas pengendalian internal (X_2) akan mencegah kecurangan (fraud) (Y) sebesar 0,334 dengan asumsi nilai variabel lain adalah tetap.
- Koefisien regresi pada variabel budaya organisasi (X_3) menunjukkan nilai positif sebesar 0,405, dengan demikian budaya organisasi (X_3) akan mencegah kecurangan (fraud) (Y) sebesar 0,405 dengan asumsi nilai variabel lain adalah tetap.

Uji Determinan R Square

Tabel 6. Hasil Uji Determinan R Square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.853 ^a	.728	.703	1.765
a. Predictors: (Constant), Budaya organisasi, Peran Auditor Pemerintah Daerah, Efektivitas Pengendalian Internal				
b. Dependent Variable: Pencegahan kecurangan				

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan tabel 4.17, menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,728 atau 72,8% atau dapat dikatakan variabel independen cukup kuat untuk memprediksi variabel dependen sehingga variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (pengaruh auditor internal pemerintah daerah, efektivitas pengendalian internal, dan budaya organisasi) memberikan kontribusi terhadap variabel dependen pencegahan kecurangan (fraud) sebesar 72,8%, sehingga sisanya 27,2% adalah variabel lain yang tidak dijadikan variabel independen pada penelitian ini.

Peran auditor internal pemerintah terhadap pencegahan kecurangan

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa $t_{hitung} 0,171 < t_{tabel} 2,037$ dengan nilai signifikan dari variabel peran auditor internal pemerintah daerah sebesar $0,865 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel peran auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan.

Dalam perspektif *funksionalis* (antropologis), teori peran merupakan sekumpulan harapan masyarakat terhadap individu. Harapan peran (*role expectations*) terdiri dari hak serta hak istimewa, tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban, dari setiap orang mengenai posisi sosialnya dalam relasinya dengan orang-orang lain yang memiliki posisi-posisi lain dalam

struktur sosial (Juneman, 2011). Berdasarkan teori peran (*role theory*) peneliti menganggap bahwa auditor internal pemerintah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang diharapkan masyarakat (*role expectation*) dapat mencegah terjadinya kecurangan dengan menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya yang telah ditetapkan. Selain itu, berdasarkan *teori fraud triangle* menjelaskan bahwa penyebab terjadinya fraud karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalitas. Dengan adanya peranan yang diberikan oleh auditor internal maka dapat meminimalisir penyebab terjadi kecurangan. Peran auditor internal pemerintah daerah yang berjalan dengan baik dapat mencegah dari terjadinya fraud di pemerintahan.

Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa $t_{hitung} 3,639 > t_{tabel} 2,037$ dengan nilai signifikan dari efektivitas pengendalian sebesar $0,001 < 0,05$. artinya bahwa variabel efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan.

Merujuk pada teori peran (*role theory*), peneliti menganggap adanya peranan pengendalian internal yang diharapkan oleh organisasi (*role expectation*) berperan dalam mencegah kecurangan dengan merancang pengendalian internal sesuai dengan komponen-komponennya. Selain itu, berdasarkan *teori fraud triangle* menjelaskan bahwa penyebab terjadinya fraud karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalitas. Dengan adanya peran pengendalian yang efektif maka dapat meminimalisir kesempatan/peluang untuk melakukan kecurangan sehingga kecurangan dapat dicegah.

Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa $t_{hitung} 3,925 > t_{tabel} 2,037$ dengan nilai signifikan dari variabel budaya organisasi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan.

Merujuk pada teori peran (*role theory*) peneliti menganggap dengan menciptakan budaya-budaya baik di dalam organisasi diharapkan dapat mencegah kecurangan yang terjadi (*role expectation*). Selain itu, berdasarkan *teori fraud triangle* menjelaskan bahwa penyebab terjadinya fraud karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalitas. Dengan adanya peran budaya organisasi maka dapat meminimalisir kesempatan/peluang untuk melakukan kecurangan sehingga kecurangan dapat dicegah.

KESIMPULAN

Semakin besar peran yang di berikan Auditor Internal Pemerintah Daerah maka semakin besar pula kecurangan dapat di cegah, semakin efektif pengendalian internal yang dirancang dan di terapkan maka semakin tinggi kecurangan dapat dicegah, serta semakin baik etos budaya organisasi yang di terapkan maka semakin tinggi kemungkinan kecurangan dapat di cegah. Jadi baik auditor Internal pemerintah daerah, efektifitas pengendalian internal dan budaya organisasi memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan kecurangan.

Hal mendukung teori peran (*role theory*) yang bertujuan untuk memahami adanya sekumpulan harapan masyarakat terhadap individu. Harapan peran (*role expectations*) terdiri dari hak serta hak istimewa, tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban, dari setiap orang mengenai posisi sosialnya dalam relasinya dengan orang-orang lain yang memiliki posisi-posisi lain dalam struktur sosial yang mana hal ini sejalan dengan variabel yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu peran auditor internal pemerintah daerah, efektivitas pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan.

REFERENSI

- Abdul, H. (t.t.). *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)* (5 ed.). UPP STIM YKPN.
- ACFE. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*.
- ACFE. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*.
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101–113.
- Aprilia, K. I., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar). *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 25–45.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota*. <https://www.bps.go.id>
- Barus, Y. P. P., Chung, J., & Umar, H. (2021). Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019. *Kocenin Serial Konferensi*, 1. <https://publikasi.kocenin.com/>
- BPKP. (2008). *FRAUD AUDITING* (5 ed.). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- COSO. (2012). *Framework and Appendices Internal Control-Integrated Framework*. www.ic.coso.org
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (5 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hall, J. A. (2015). *Information Technology Auditing*. Cengage Learning.
- Hutami, G., & Chariri, A. (2011). *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*.
- Juneman. (2011). Teori-Teori Transorientasional Dalam Psikologi Sosial. *Humaniora*, 2(2), 1351–1367.
- Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor S-01/AAIPI/3/2014 Tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (t.t.). Diambil 3 November 2023, dari <https://www.kemenpppa.go.id>
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-496/BL/2008 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. (t.t.). Diambil 6 November 2023, dari <https://ojk.go.id>
- KPK. (2023a). *Berita KPK*. www.kpk.go.id
- KPK. (2023b, Januari 17). *Statistik TPK Berdasarkan Instansi*. www.kpk.go.id
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi* (3 ed.). Salemba Empat.
- Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. (t.t.). Diambil 3 November 2023, dari <http://irtama.bappenas.go.id/>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (t.t.). Diambil 2 November 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pusdiklatwas BPKP. (2008). *Etika dalam Fraud*. BPKP.
- Rahman, K. G., Mursalim, & Su'un, M. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Karimah STIE AMKOP Makassar*, 3(4), 863–871. <https://www.researchgate.net/publication/328576694>
- Rumiris, F. J., & Siagian, H. L. (2016). Pengaruh Fungsi Audit Internal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal (Studi pada Tiga Perusahaan BUMN Kota Bandung). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis-EKONOMIS*, 10(1), 1–12.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Tugiman, H. (2000). *Pengantar Dalam Mempelajari Internal Auditing*.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (t.t.). Diambil 21 Oktober 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Wikipedia. (2022). *Corruption Perceptions Index*.
- Zunaedi, B. N. F., Annisa, H. R., & Dewi, M. (2022). Fungsi Internal Audit dan Manajemen Risiko Perusahaan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 24(1), 59–70. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>